

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Secara umum angka inflasi yang menggambarkan kecenderungan umum tentang perkembangan harga dan perubahan nilai dapat dipakai sebagai informasi dasar dalam pengambilan keputusan baik tingkat ekonomi mikro atau makro, baik fiskal maupun moneter. Pada skala mikro, rumah tangga/masyarakat misalnya, informasi mengenai angka inflasi dimanfaatkan sebagai dasar dalam melakukan penyesuaian pengeluaran kebutuhan sehari-hari dengan pendapatan yang relatif tetap. Pada skala perusahaan, informasi mengenai angka inflasi dapat dipakai untuk menyusun suatu perencanaan pembelanjaan dan kontrak bisnis. Sementara dalam lingkup yang lebih luas (makro), angka inflasi menggambarkan kondisi/stabilitas moneter dan perekonomian.

Inflasi merupakan suatu fenomena ekonomi yang terutama terjadi di negara-negara berkembang dan senantiasa menjadi objek penelitian yang sangat menarik. Inflasi menjadi *concern* utama setiap negara dalam pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya. Kestabilan ekonomi yang tercermin dari kestabilan harga di suatu negara akan menarik investasi luar negeri dan menimbulkan ketenangan dalam politik dan pemerintahan.

Perlunya pengendalian inflasi didasarkan pada pertimbangan, bahwa inflasi yang tinggi dan tidak stabil memberikan dampak negatif kepada kondisi sosial ekonomi masyarakat. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan pendapatan riil

masyarakat mengalami penurunan sehingga standar hidup dari masyarakat turun dan akhirnya menjadikan semua orang, terutama orang miskin, bertambah miskin. Di samping itu, tingkat inflasi domestik yang lebih tinggi dibanding dengan tingkat inflasi luar negeri menjadikan tingkat bunga domestik riil menjadi tidak kompetitif sehingga dapat memberikan tekanan pada nilai rupiah. Selanjutnya, inflasi yang tidak stabil akan menciptakan ketidakpastian (*uncertainty*) bagi pelaku ekonomi dalam pengambilan keputusan.

Pembahasan mengenai permasalahan inflasi di beberapa negara sebagian besar diwarnai oleh perhatian yang lebih diarahkan pada perkembangan dari variabel-variabel utama lain yang terkait, misalnya upah (gaji), produktivitas, keuntungan kegiatan dunia usaha (bisnis), dan kesempatan kerja. Hal ini disebabkan oleh adanya kecenderungan bahwa tekanan inflasi yang tinggi akan mendorong variabel-variabel utama tersebut berubah secara serentak.

Pada saat krisis yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997, pertumbuhan ekonomi mengalami pertumbuhan negatif, nilai tukar Rupiah melemah. Di sisi lain, jumlah uang beredar dan suku bunga meningkat tajam. Kondisi ini menyebabkan harga-harga melonjak tajam. Bahaya hiperinflasi muncul ketika lingkaran depresiasi-inflasi bersama dengan ekspansi uang beredar yang naik pesat telah mengakibatkan laju inflasi melonjak tinggi. Akibatnya jelas, kegiatan produksi dan investasi di hampir seluruh sektor ekonomi menurun drastis sehingga perekonomian secara keseluruhan mengalami kontraksi yang amat dalam, disertai dengan kondisi sosial-politik yang semakin bergejolak sebagai dampak meluasnya pengangguran dan kemiskinan.

Menghadapi situasi krisis tersebut, pemerintah telah berupaya untuk menempuh berbagai langkah kebijakan untuk mengembalikan stabilitas, khususnya di bidang moneter dan perbankan, sekaligus memulihkan kegiatan ekonomi. Namun, kompleksnya kadar permasalahan serta adanya berbagai keterbatasan dan hambatan baik ekonomis maupun politis dalam pelaksanaan kebijakan telah menyebabkan keefektifan dan pencapaian hasil kebijakan yang ditempuh tidak sebaik dan secepat yang diharapkan. Penerapan kebijakan makroekonomi dalam mendorong kegiatan ekonomi tidak dapat serta merta dilakukan karena terdapat situasi yang dilematis. Di satu sisi, permintaan domestik yang melemah sebagai akibat krisis yang terjadi memerlukan kebijakan makroekonomi yang ekspansif. Akan tetapi, di sisi lain laju inflasi yang meningkat tajam, antara lain sebagai akibat melemahnya nilai tukar rupiah dan melonjaknya uang beredar, menuntut kebijakan makroekonomi yang kontraktif. Hal ini diperburuk lagi dengan makin menurunnya kepercayaan masyarakat selama krisis, khususnya terhadap sistem perbankan.

Berdasarkan analisis terhadap perilaku inflasi diketahui bahwa inflasi Indonesia terutama disebabkan oleh pola pembentukan ekspektasi inflasi yang masih didominasi oleh inflasi masa lalu atau ekspektasi adaptif (Anwar dan Chawwa, 2008). Pembentukan ekspektasi inflasi ini sebagian besar dipengaruhi oleh *supply shocks*, seperti: kejutan harga minyak dunia, kenaikan harga BBM dalam negeri, depresiasi nilai tukar, dan fluktuasi berlebihan nilai tukar Rupiah, serta kenaikan upah minimum yang melebihi inflasi.

Menurut Juhro (2007), rata-rata kontribusi pengaruh *shocks* sisi penawaran pada perubahan harga selama lebih dari dua dekade terakhir adalah 55-60%, lebih besar dibandingkan dengan kontribusi pengaruh *shocks* sisi permintaan yang berkisar 40-45%, sedangkan komposisi pengaruh *shocks* sisi permintaan didominasi oleh *shocks* moneter (pasar uang) serta cenderung mengalami perubahan yang tidak terlalu signifikan dari waktu ke waktu. Untuk menurunkan tingkat inflasi diperlukan perpaduan antara kebijakan moneter, nilai tukar, dan perbankan, serta koordinasi dengan berbagai kebijakan pemerintah (*policy mix*).

Menjaga kestabilan harga baik harga barang maupun harga mata uang rupiah merupakan tugas Bank Indonesia sesuai dengan amanat Undang-Undang No.14 tahun 1999. Kestabilan harga dilakukan dengan menjaga nilai Rupiah terhadap harga barang dan nilai Rupiah terhadap mata uang negara lain agar tetap stabil. Secara spesifik tugas utama tersebut dinyatakan dalam bentuk pencapaian sasaran inflasi yang rendah dan stabil, yang berdasarkan UU No.4/2004 ditetapkan oleh pemerintah setelah berkonsultasi dengan Bank Indonesia. Untuk mencapai sasaran inflasi tersebut negara memberikan independensi kepada Bank Indonesia dalam melakukan kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tersebut perlu didukung oleh kebijakan untuk menjaga volatilitas nilai tukar, kebijakan perbankan yang mendorong percepatan penyaluran kredit produksi dan investasi secara prudensial, dan strategi komunikasi kebijakan yang efektif untuk memperbaiki pola pembentukan ekspektasi masyarakat.

Kemampuan kebijakan moneter dalam mengatasi permasalahan struktural sejauh ini masih terus dikaji. Dalam kerangka kebijakan moneter *Inflation Targeting Framework* (ITF), suku bunga merupakan satu-satunya instrumen kebijakan moneter yang kemudian mempengaruhi permintaan agregat dan *output gap*, serta ekspektasi inflasi mengarah pada sasaran inflasi yang telah ditetapkan. Namun dalam sistem perekonomian terbuka, kenaikan suku bunga seringkali tidak efektif karena mendorong kenaikan modal masuk yang kemudian menambah likuiditas perekonomian. Tanpa sterilisasi, kenaikan likuiditas yang terjadi akan mendorong inflasi.

Dalam penerapan ITF, melalui penetapan *BI Rate* sebagai suku bunga acuan Bank Indonesia pada dasarnya berupaya menstabilkan perkembangan inflasi dan ekonomi riil secara bersama-sama, yaitu pencapaian tingkat inflasi yang diharapkan dengan tetap memperhitungkan dinamika perkembangan variabel ekonomi makro seperti: pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dan perkembangan sektor keuangan. Dalam kaitan ini, penetapan BI Rate senantiasa mempertimbangkan beberapa faktor, a.l.: *forecast* terhadap inflasi, pertumbuhan ekonomi, nilai tukar, dalam dua tahun ke depan; perkembangan suku bunga dan kredit perbankan.

Dari sisi pemerintah diperlukan kebijakan pendapatan yang mengarahkan agar kenaikan upah nominal lebih mengacu pada proyeksi atau sasaran inflasi dan kenaikan upah riil tidak melebihi kenaikan produktivitas tenaga kerja. Kebijakan-kebijakan pendukung lainnya adalah kebijakan produksi dan distribusi yang

meningkatkan efisiensi dan persaingan, pengawasan, dan perbaikan kondisi persaingan usaha, serta pengurangan ekonomi biaya tinggi.

Perumusan kebijakan moneter yang tepat oleh Bank Indonesia memerlukan pemahaman yang baik terhadap karakteristik inflasi Indonesia dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pemahaman tersebut akan mempengaruhi perumusan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penentuan sasaran akhir inflasi yang optimal, pemilihan kerangka operasional kebijakan moneter, komunikasi kebijakan moneter, dan koordinasi dengan kebijakan ekonomi lainnya.

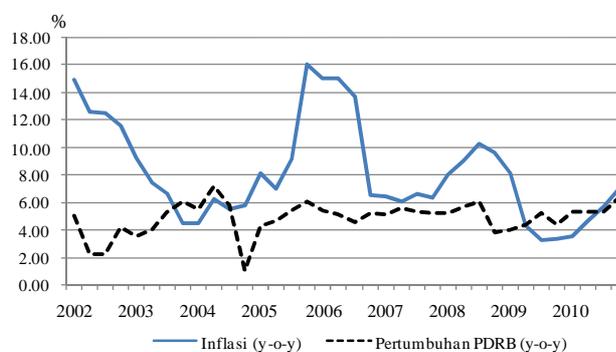
Bank sentral yang beroperasi dengan kebijakan *inflation targeting* sangat membutuhkan peramalan inflasi yang akurat dalam menciptakan laju inflasi yang terkendali. Bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia menggunakan perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) dalam mengukur besaran inflasi sebagai targetnya, baik dari sisi teoritis maupun dari segi kepraktisannya. Kelebihan digunakannya IHK ini antara lain adalah merupakan alat ukur yang paling tepat dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat karena IHK mengukur indeks biaya hidup konsumen.

Bank Indonesia dalam memperkirakan besaran inflasi (perubahan IHK) nasional menggunakan beberapa model, antara lain: *General Equilibrium Model Bank Indonesia* (GEMBI), *Short-term Forecasting Indonesian Economic* (SOFIE), dan *Small Scale Macroeconomic Model* (SSMX). Selain model, Bank Indonesia juga memperoleh perkiraan besaran inflasi melalui penyelenggaraan beberapa macam survei, baik di sisi produksi maupun di sisi konsumsi.

Salah satu indikator dalam menilai kestabilan perekonomian suatu wilayah adalah dengan melihat perkembangan inflasinya. Inflasi yang stabil dan berada pada tingkat yang rendah menjadi prasyarat penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan karena dapat mendorong meningkatnya kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan terjaganya daya beli. Sebaliknya, inflasi yang tidak stabil akan menyulitkan pengambilan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Selama kurun waktu 2002 hingga 2010, inflasi meningkat lebih cepat dibanding pertumbuhan perekonomian di Jawa Tengah (Grafik 1.1.). Dengan pertumbuhan yang lebih rendah dibanding inflasi, maka berarti kesejahteraan riil masyarakat sebenarnya mengalami penurunan.

Gambar 1.1.
Perkembangan Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi
Provinsi Jawa Tengah Periode 2002-2010 (dalam persen)

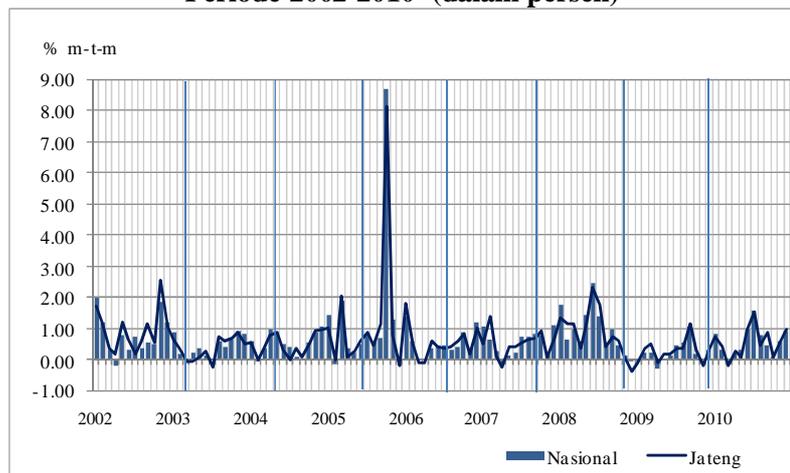


Sumber: BPS (diolah)

Dibandingkan dengan inflasi Nasional, inflasi Jawa Tengah baik secara bulanan maupun tahunan pada periode 2002 s.d. 2010 cenderung memiliki pola perkembangan yang hampir sama. Secara bulanan, terlihat bahwa perkembangan

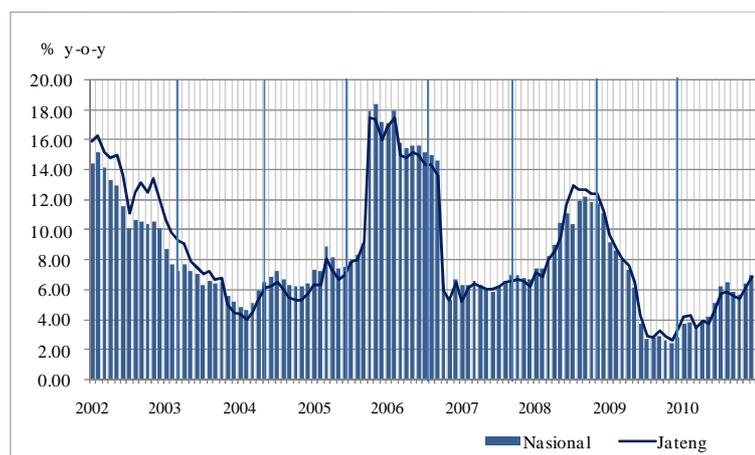
inflasi Jawa Tengah lebih rendah dibanding inflasi Nasional. Namun sejak 2009, terlihat kecenderungan inflasi Jawa Tengah relatif lebih tinggi dibanding inflasi Nasional (Gambar 1.2).

Gambar 1.2.
Perbandingan Inflasi Bulanan (m-t-m) Nasional dan Jawa Tengah
Periode 2002-2010 (dalam persen)



Sumber: BPS (diolah)

Gambar 1.3.
Perbandingan Inflasi Tahunan (y-o-y) Nasional dan Jawa Tengah
2002-2010 (dalam persen)



Sumber: BPS (diolah)

Secara tahunan, sebelum akhir 2003 perkembangan inflasi Jawa Tengah selalu berada di atas inflasi Nasional. Namun memasuki 2004, inflasi Jawa Tengah cenderung berada di bawah inflasi Nasional. Sejak Mei 2009, inflasi Jawa Tengah kembali memperlihatkan kecenderungan yang lebih tinggi dibanding inflasi Nasional (Gambar 1.3.).

Terkait dengan kepentingan regional, penerapan atas kebijakan mengenai otonomi daerah yang mulai digulirkan dengan diterbitkannya UU No.22 tahun 1999 memiliki implikasi terhadap kegiatan ekonomi di daerah. Salah satu implikasi dari otonomi daerah baik secara jangka menengah atau panjang adalah mengenai inflasi daerah. Meski target inflasi secara umum berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 menjadi tanggung jawab Bank Indonesia, namun seiring kebijakan desentralisasi tersebut, daerah memiliki kekuasaan dan kebebasan lebih besar untuk mengatur serta mengelola kegiatan ekonomi di daerahnya (Brodjonegoro, 2008). Konsekuensi dari adanya kekuasaan dan kebebasan tersebut adalah sumber-sumber penyebab terjadinya inflasi menjadi lebih tersebar dan bahkan menjadi sulit dikontrol dibandingkan saat masih berlakunya kebijakan sentralisasi.

Sejak penerapan kebijakan otonomi daerah pada 1999, terdapat kecenderungan inflasi Jawa Tengah berada pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional. Adanya *gap* yang semakin menyempit antara inflasi regional Jawa Tengah dan inflasi nasional mengindikasikan peningkatan kontribusi inflasi di Jawa Tengah dalam pembentukan inflasi nasional.

Pola-pola perkembangan inflasi regional Jawa Tengah yang bersama-sama dengan empat provinsi besar lainnya (DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur)

berkontribusi dalam pembentukan inflasi nasional sebesar 57,83%, juga dipengaruhi oleh beberapa faktor musiman, seperti: hari Raya Idul Fitri, libur akhir tahun, panen raya, dll. Dengan mencermati pola musiman perkembangan inflasi ini, diharapkan antisipasi terhadap lonjakan yang akan terjadi juga dapat dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan inflasi Jawa Tengah melalui faktor-faktor yang mempengaruhinya baik dari sisi permintaan (*demand pull inflation*) maupun dari sisi penawaran (*cost push inflation*) dan melakukan analisis terhadap model empiris dalam memproyeksikan tingkat inflasi bulanan pada skala regional Jawa Tengah.

Karakteristik inflasi di provinsi Jawa Tengah akan menjadi topik awal pembahasan dalam penelitian ini. Selanjutnya, secara ringkas akan ditinjau teori pembentukan inflasi dan penelitian empiris yang dilakukan sebelumnya sebagai landasan untuk membahas determinan inflasi dan menganalisis model proyeksi inflasi provinsi Jawa Tengah. Pendekatan analisis mengacu pada hasil sejumlah penelitian yang telah dilakukan khususnya penelitian Bank Indonesia dan jurnal-jurnal ekonomi yang terkait dengan inflasi.

Pada bagian terakhir penelitian akan disampaikan kesimpulan dan saran yang perlu diketahui baik oleh pemerintah maupun otoritas terkait dalam menetapkan kebijakan yang terkait dengan harga terutama pada level regional provinsi Jawa Tengah.

1.2. Rumusan Masalah

Inflasi di Jawa Tengah dalam beberapa periode terakhir, terutama sejak penerapan kebijakan otonomi daerah pada 1999 cenderung berada di atas tingkat inflasi nasional. Dengan *gap* yang semakin kecil dengan besaran inflasi nasional, peran inflasi di Jawa Tengah dalam pembentukan inflasi nasional cenderung semakin besar.

Perkembangan inflasi di Jawa Tengah melebihi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Hal ini berarti bahwa meski perekonomian mengalami pertumbuhan, namun kesejahteraan masyarakat secara riil tidak mengalami peningkatan. Oleh karena itu, inflasi di Jawa Tengah perlu dipantau dan dikendalikan perkembangannya, termasuk faktor-faktor yang dapat mempengaruhi inflasi itu sendiri, yaitu variabel uang beredar, *output gap*, dan suku bunga kredit (dari sisi permintaan) maupun variabel nilai tukar dan ekspektasi harga (dari sisi penawaran). Penetapan variabel tersebut dilakukan berdasarkan pada teori ekonomi yang ada dan dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya, dari variabel-variabel tersebut di atas akan disusun model proyeksi inflasi dengan memodifikasi model proyeksi yang terdapat pada penelitian sebelumnya.

1.3. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Melakukan analisis terhadap perkembangan inflasi di Jawa Tengah melalui faktor-faktor yang dipengaruhinya, baik dari sisi permintaan (uang beredar,

output gap, dan suku bunga kredit) maupun dari sisi penawaran (nilai tukar dan ekspektasi harga).

2. Melakukan analisis model proyeksi inflasi Jawa Tengah.

Adapun manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Dapat mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan inflasi regional Jawa Tengah, agar dalam penetapan kebijakan yang terkait dengan faktor-faktor tersebut juga mempertimbangkan dampaknya terhadap inflasi.
2. Dapat mengetahui arah perkembangan inflasi regional, sehingga dapat dilakukan upaya/antisipasi dini dalam menekan terjadinya gejolak harga.
3. Dapat mendukung Bank Indonesia dan instansi/dinas terkait dalam memberikan masukan kepada pemerintah daerah untuk tujuan stabilisasi harga di regional Jawa Tengah.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dalam melakukan penelitian yang terkait dengan analisis model proyeksi inflasi regional.